

Analisis Ketidaksantunan Berbahasa Netizen terhadap Kinerja Pemerintah dalam Penanganan Banjir Sumatera di Media Sosial X

Andika Kurniawan Luthfi¹, M. Daffa Amri², Muhammad Anis Rofiq³,
Nadif Abinaya Yulkham⁴, Mikhail Aimran Sobirin⁵, Asep Purwo Yudi Utomo^{6*}, Sony
Junaedi⁷, Eko Ahmad Riyanto⁸

^{1, 2, 3, 4, 5}Sastra Indonesia, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

⁶Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

⁷Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

⁸UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia

Email: andikakurniawanluthfi03@students.unnes.ac.id¹, dapaamri12@students.unnes.ac.id²,
muhammadanisrofiq@students.unnes.ac.id³, nadifabinaya19@students.unnes.ac.id⁴,
mikhailshobirin@students.unnes.ac.id⁵, asepyu@mail.unnes.ac.id⁶, sony-junaedi@untagsmg.ac.id⁷,
eko.ahmad.r@uinsaizu.ac.id⁸

*Penulis Korespondensi: asepyu@mail.unnes.ac.id

Abstract. *The shift in communication patterns to digital public spaces, such as platform X, often triggers a disregard for language ethics, especially in crisis situations such as natural disasters. This phenomenon underscores the importance of examining how politeness is maintained or violated when people express their aspirations on social media. This study aims to identify and describe the forms of violations of the maxims of politeness committed by netizens regarding government policies in the context of disasters. The method used is descriptive qualitative with a listening and note-taking technique, referring to the theoretical framework of the ten maxims of politeness from Leech's theory. The results of the study indicate a significant level of violation, with a dominance of the maxim of generosity using swear words, taboo words, and insults as a form of social protest and emotional expression. These verbal actions not only threaten the government's authority (face) but also indicate a degradation of language ethics in Indonesia's digital ecosystem. Theoretically, this study is useful for enriching pragmatic studies in digital linguistics. Practically, these findings provide a basis for evaluating how the public can convey public aspirations more effectively and constructively without harming the value of politeness in cyberspace.*

Keywords: Digital Ethics; Language Politeness; Maxims of Politeness; Social Media X; Social Protest.

Abstrak. Pergeseran pola komunikasi ke ruang publik digital, seperti platform X, sering kali memicu pengabaian etika berbahasa, terutama dalam situasi krisis seperti bencana alam. Fenomena ini melatarbelakangi pentingnya mengkaji bagaimana kesantunan tetap dijaga atau justru dilanggar saat masyarakat menyampaikan aspirasi di media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan bentuk pelanggaran maksim kesantunan berbahasa yang dilakukan warganet terhadap kebijakan pemerintah dalam konteks bencana. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik simak dan catat, merujuk pada kerangka teori sepuluh maksim kesantunan dari teori Leech. Hasil penelitian menunjukkan adanya tingkat pelanggaran yang signifikan, dengan dominasi pada maksim kemurahan melalui penggunaan diksi makian, kata-kata tabu, dan penghinaan sebagai bentuk protes sosial serta ekspresi emosional. Tindakan verbal ini tidak hanya mengancam wibawa (muka) pemerintah, tetapi juga menunjukkan adanya degradasi etika berbahasa dalam ekosistem digital Indonesia. Secara teoretis, penelitian ini bermanfaat memperkaya kajian pragmatik dalam linguistik digital. Secara praktis, temuan ini menjadi landasan evaluasi bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi publik agar lebih efektif dan konstruktif tanpa mencederai nilai kesantunan di ruang siber.

Kata Kunci: Etika Digital; Kesantunan Berbahasa; Maksim Kesantunan; Media Sosial X; Protes Sosial.

1. PENDAHULUAN

Bahasa merupakan instrumen utama dalam komunikasi yang memungkinkan simbol dan konsensus tersusun menjadi pesan yang disampaikan oleh komunikator kepada mitra tutur (Wijayanti & Saputra, 2021).

Sebagai alat interaksi sosial, bahasa tidak hanya berfungsi sebagai media penyampai gagasan, tetapi juga mencerminkan etika penuturnya melalui penerapan prinsip kesantunan. Kesantunan berbahasa menjadi prasyarat utama agar harmoni tetap terjaga, baik dalam situasi formal maupun informal (Musthofa & Utomo, 2021). Dalam kajian pragmatik, penerapan prinsip ini sangat penting untuk mengidentifikasi tingkat peradaban tutur seseorang, khususnya dalam kegiatan yang melibatkan perbedaan argumen (Wulandari, 2020). Melalui pematuhan maksim kesantunan, sebuah dialog publik dapat berjalan efektif tanpa mengancam muka atau menyinggung perasaan mitra tutur (Nursita et al., 2022).

Namun, seiring pesatnya transformasi digital, pola komunikasi masyarakat mengalami pergeseran drastis ke ranah media sosial seperti X (Twitter) dan Instagram. Isu khusus yang muncul adalah masifnya pelanggaran prinsip kesantunan saat netizen merespons kinerja pemerintah, seperti dalam kasus penanganan banjir di Sumatera. Karakteristik media sosial yang bersifat terbuka sering kali memicu munculnya tindak pengancaman muka, baik muka positif maupun negatif, melalui strategi ketidaksantunan. Fenomena ini diperparah dengan kecenderungan netizen menggunakan kata makian untuk mengutarakan frustrasi, serta rendahnya penghargaan terhadap tokoh publik yang terlihat dari dominasi pelanggaran maksim penghargaan di kolom komentar (Lestari & Assidik, 2024). Ketidaksantunan ini tidak hanya mencerminkan degradasi etika digital, tetapi juga berimbas pada kesalahan bahasa dan ketidakefektifan kalimat yang justru mengaburkan substansi kritik yang ingin disampaikan (Utomo et al., 2019).

Pemilihan judul "Analisis Ketidaksantunan Berbahasa Netizen terhadap Kinerja Pemerintah dalam Penanganan Banjir Sumatera di Media Sosial X" didasari oleh realitas bahwa media sosial X merupakan ruang publik digital yang paling responsif dalam merekam dinamika sosiopolitik di Indonesia. Berbeda dengan platform lain, X memiliki karakteristik persebaran informasi yang sangat cepat, sehingga memungkinkan peneliti menangkap fenomena bahasa secara natural saat sebuah peristiwa krisis terjadi. Penggunaan bahasa dalam judul ini difokuskan pada aspek ketidaksantunan karena platform tersebut sering kali menjadi wadah terjadinya tindak pengancaman muka, baik muka positif maupun negatif, yang dilakukan netizen terhadap pemangku kebijakan). Fenomena ini memberikan data yang kaya untuk membedah bagaimana prinsip kesantunan yang seharusnya dijunjung tinggi Musthofa & Utomo (2021) justru kerap diabaikan dalam interaksi digital. Lebih lanjut, judul ini dipilih untuk mengeksplorasi keterkaitan antara konteks bencana alam dengan perilaku pragmatik masyarakat di ruang siber.

Banjir di Sumatera menjadi latar belakang yang krusial karena memicu luapan emosi publik yang cenderung *manifest* dalam bentuk diksi-diksi makian dan ungkapan ketidakpuasan (Putri et al., 2025).

Melalui judul ini, analisis tidak hanya terbatas pada bentuk pelanggaran maksim penghargaan atau kebijaksanaan yang sering muncul di kolom komentar media sosial Lestari & Assidik (2024), tetapi juga untuk melihat sejauh mana ketidaksantunan tersebut mengakibatkan kesalahan bahasa dan ketidakefektifan pesan dalam penyampaian aspirasi (Utomo et al., 2019). Dengan demikian, judul ini mampu memotret anomali antara fungsi bahasa sebagai alat komunikasi yang santun dengan realitas konfrontatif di media sosial X (Suryani et al., 2022).

Penelitian ini sangat penting dilakukan karena kesantunan berbahasa merupakan cerminan peradaban suatu bangsa dan prasyarat utama dalam menjaga harmoni sosial di tengah masyarakat (Musthofa & Utomo, 2021). Di era disrupsi digital, batasan etika berkomunikasi sering kali kabur, sehingga pemetaan terhadap pematuhan dan pelanggaran prinsip kesantunan menjadi krusial untuk mengidentifikasi tingkat kedewasaan tutur masyarakat dalam merespons kebijakan public (Wulandari, 2020). Melalui penelitian ini, kita dapat memahami bagaimana strategi ketidaksantunan digunakan sebagai bentuk perlawanan verbal yang berpotensi melakukan tindak pengancaman muka, baik muka positif maupun negatif, terhadap otoritas (Jayanti & Subyantoro, 2019). Hal ini penting untuk dievaluasi agar dialog antara warga negara dan pemerintah tetap berjalan efektif tanpa mengabaikan perasaan mitra tutur (Nursita et al., 2022).

Selain itu, penelitian ini memiliki urgensi tinggi karena fenomena ketidaksantunan di media sosial sering kali berimplikasi pada rendahnya kualitas diskursus publik. Penggunaan kata makian yang masif untuk mengekspresikan emosi (Wijaya, 2021) serta pengabaian terhadap maksim penghargaan dalam kolom komentar (Lestari & Assidik, 2024) menunjukkan adanya degradasi nilai sosiolinguistik yang perlu segera dianalisis. Jika dibiarkan, pola komunikasi yang melegalkan ketidaksantunan ini tidak hanya merusak etika berbahasa, tetapi juga menyebabkan kesalahan bahasa dan ketidakefektifan penyampaian pesan yang sistematis (Utomo et al., 2019). Dengan demikian, penelitian ini hadir sebagai upaya untuk mendokumentasikan dinamika bahasa sekaligus memberikan dasar ilmiah bagi upaya perbaikan literasi digital dan etika berkomunikasi di Indonesia. Penelitian mengenai kesantunan berbahasa telah banyak dilakukan dengan berbagai objek dan fokus yang beragam.

Sejumlah peneliti telah mengevaluasi pematuhan dan pelanggaran maksim kesantunan pada ruang formal, seperti praktik debat siswa (Wulandari, 2020) serta dialog dalam program *talkshow* televisi (Acara et al., 2021); (Nursita et al., 2022). Di ranah media digital, kajian terdahulu telah memetakan penggunaan kata makian sebagai ekspresi emosi di Twitter (Wijaya, 2021) serta bentuk-bentuk disfemisme dan pelanggaran maksim penghargaan pada kolom komentar Instagram tokoh public (Lestari & Assidik, 2024). Bahkan, penelitian mengenai strategi ketidaksantunan yang memicu tindak pengancaman muka di media sosial juga telah dirintis untuk melihat pola interaksi warganet secara umum (Jayanti & Subyantoro, 2019).

Meskipun dasar teori mengenai kesantunan dan analisis kesalahan berbahasa (Utomo et al., 2019) sudah mapan, masih terdapat celah penelitian (*research gap*) yang belum tersentuh secara spesifik. Belum ditemukan penelitian yang secara mendalam mengintegrasikan analisis ketidaksantunan pragmatik dengan konteks krisis bencana alam regional, khususnya terkait kinerja pemerintah dalam penanganan banjir di Sumatera pada platform X. Kebanyakan penelitian terdahulu berfokus pada tokoh politik secara personal atau interaksi pendidikan daring, sehingga penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut. Fokus utama penelitian ini adalah mengungkap bagaimana tekanan situasi bencana alam mengubah pola santun masyarakat menjadi tutur konfrontatif yang tidak hanya melanggar etika, tetapi juga memicu ketidakefektifan komunikasi publik.

Solusi utama yang ditawarkan melalui penelitian ini adalah penyediaan kerangka analisis bagi pemerintah dan instansi publik untuk memahami pola komunikasi serta sentimen netizen di masa krisis. Dengan mengidentifikasi bentuk-bentuk strategi ketidaksantunan yang memicu tindak pengancaman muka (Jayanti & Subyantoro, 2019), penelitian ini memberikan rekomendasi mengenai pentingnya strategi komunikasi publik yang lebih empatik dan responsif untuk meredam eskalasi konflik verbal di media sosial. Hal ini sejalan dengan perlunya pemahaman mendalam terhadap tindak tutur dan maksim kesantunan agar pesan yang disampaikan antara pemerintah dan masyarakat tidak menimbulkan salah paham atau resistensi yang lebih besar (Musthofa & Utomo, 2021). Melalui pendekatan ini, pemerintah dapat memetakan kritik yang substantif meskipun disampaikan melalui diksi yang tidak santun atau makian. Pentingnya penelitian ini juga terletak pada fungsinya sebagai instrumen penguatan literasi digital dan etika berbahasa di ruang siber.

Dengan membedah data pelanggaran maksim penghargaan dan kebijaksanaan yang dominan di media sosial Lestari & Assidik (2024), penelitian ini mengajak pembaca dan netizen untuk berefleksi bahwa ketidaksantunan sering kali justru mengakibatkan kesalahan bahasa dan ketidakefektifan kalimat yang mengaburkan esensi aspirasi (Utomo et al., 2019). Penelitian ini menjadi krusial karena berupaya mengembalikan marwah bahasa sebagai instrumen komunikasi yang santun dan efektif, sehingga dialog publik terkait isu sensitif seperti penanganan banjir dapat berlangsung tanpa mencederai perasaan mitra tutur (Nursita et al., 2022). Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada terciptanya ekosistem digital yang lebih sehat dan bermartabat.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan mengklasifikasikan bentuk-bentuk ketidaksantunan berbahasa yang digunakan oleh netizen di media sosial X terkait kinerja pemerintah dalam penanganan banjir di Sumatera. Dengan menggunakan pisau analisis pragmatik, penelitian ini berupaya memetakan jenis pelanggaran maksim kesantunan yang paling dominan, seperti maksim penghargaan dan kebijaksanaan yang sering kali terabaikan dalam interaksi digital (Lestari & Assidik, 2024).

Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi ketidaksantunan yang digunakan, baik berupa tindak pengancaman muka positif maupun negative (Jayanti & Subyantoro, 2019), guna memberikan gambaran objektif mengenai kualitas komunikasi publik di media sosial saat ini (Ayuningdyas et al., 2025).

Lebih jauh lagi, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konteks dan maksud di balik penggunaan diksi-diksi makian yang dilontarkan oleh netizen. Hal ini dilakukan untuk memahami apakah tuturan tersebut murni berfungsi sebagai luapan emosi ekspresif (Wijaya, 2021) atau memiliki fungsi pragmatik lain sebagai bentuk protes sosial. Melalui pencapaian tujuan tersebut, diharapkan penelitian ini dapat mengungkap keterkaitan antara kegagalan pengelolaan komunikasi bencana dengan munculnya kesalahan bahasa dan ketidakefektifan kalimat dalam penyampaian aspirasi (Utomo et al., 2019). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berhenti pada klasifikasi linguistik, tetapi juga memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika sosiolinguistik di ruang siber Indonesia (Acara et al., 2021).

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan ilmu linguistik, khususnya dalam cabang pragmatik dan sosiolinguistik digital di Indonesia. Hasil penelitian ini memperkaya literatur mengenai pematuhan dan pelanggaran prinsip kesantunan yang selama ini banyak diteliti pada objek lisan atau teks formal (Wulandari, 2020); (Nursita et al., 2022).

Dengan membedah fenomena ketidaksantunan di media sosial X, ilmu pengetahuan mendapatkan perspektif baru tentang bagaimana strategi ketidaksantunan dan tindak pengancaman muka (Jayanti & Subyantoro, 2019) beradaptasi dalam budaya digital yang anonim. Selain itu, penelitian ini menjadi referensi tambahan dalam memahami fungsi ekspresif dari kata makian (Wijaya, 2021) serta penggunaan disfemisme dalam diskursus politik dan bencana (Lestari & Assidik, 2024).

Secara praktis, bagi masyarakat, penelitian ini berfungsi sebagai sarana edukasi untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya etika berkomunikasi di ruang publik sesuai dengan kaidah bahasa yang baik. Masyarakat dapat memahami bahwa penggunaan bahasa yang santun tetaplah relevan sebagai instrumen komunikasi yang harmonis meskipun di tengah situasi krisis tersedianya bahan evaluasi untuk merancang strategi komunikasi krisis yang lebih responsif dan mampu meredakan ketegangan verbal di media sosial. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam menciptakan iklim demokrasi digital yang lebih sehat, di mana aspirasi tetap dapat disampaikan secara kritis tanpa harus menanggalkan prinsip kesantunan yang menjadi fondasi karakter bangsa (Acara et al., 2021).

2. LANDASAN TEORETIS

Pragmatik

Pragmatik adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari hubungan antara bahasa dan konteks yang melatarbelakangi penggunaan bahasa tersebut. Di dalam ruang komunikasi, makna sebuah ucapan tidak hanya ditentukan oleh susunan kalimatnya (sintaksis), melainkan oleh situasi di sekitar saat penutur itu berbicara. Menurut Asriani et al. (2025), kajian pragmatik berfokus pada bagaimana penutur menyampaikan maksud tertentu dan bagaimana lawan tutur memahami maksud tersebut sesuai dengan konteksnya. Pemahaman pragmatik ini menjadi sangat penting dalam interaksi digital, karena cuitan atau pembahasan di media sosial sering kali membawa emosi dan maksud sosial yang lebih mendalam daripada makna literalnya.

Inti dari studi pragmatik adalah tindakan nyata yang diwujudkan melalui ututuran maupun tulisan. (Fauziyyah et al., 2026) menegaskan bahwa pragmatik tidak hanya melihat struktur bahasa, tetapi juga cara pembicara memengaruhi tindakan atau perasaan orang lain. Tindakan nyata lewat bahasa inilah yang disebut sebagai tindak tutur. Sebagai bagian dari interaksi media digital, pemahaman yang baik tentang tindak tutur membantu peneliti memahami alasan di balik reaksi netizen saat menanggapi isu-isu sosial dan politik tertentu. Secara umum, tindak tutur terbagi menjadi beberapa kategori utama, di antaranya adalah tindak tutur ekspresif dan direktif.

Tindak tutur ekspresif digunakan untuk menyampaikan atau mengekspresikan sikap psikologis penutur terhadap suatu keadaan, seperti mengeluh atau memuji. Sementara itu, tindak tutur direktif bertujuan membuat lawan tutur melakukan suatu tindakan tertentu, seperti memerintah atau menyarankan. Melalui analisis tindak tutur ini, peneliti dapat memetakan fungsi bahasa secara lebih objektif (Ariyadi & Utomo, 2020). Komunikasi publik yang terjadi di media sosial sering kali mencerminkan pergeseran fungsi ini, di mana kritik yang awalnya berniat memberikan masukan membangun (direktif) kerap kali berubah menjadi luapan emosi frustrasi yang konfrontatif (ekspresif).

Kesantunan Berbahasa

Kesantunan berbahasa merupakan sebuah prinsip norma yang mengatur bagaimana etika berkomunikasi dijaga demi memelihara keharmonisan hubungan sosial antara penutur dan lawan tutur. Kepatuhan terhadap norma kesantunan ini menjadi indikator penting dalam menilai kualitas interaksi sosial maupun profesional di masyarakat. Oleh karena itu, kesantunan tidak sekadar berupa pilihan kata yang halus, melainkan sebuah strategi dalam mengelola hubungan antarmanusia.

Dalam kajian pragmatik yang mapan, prinsip kesantunan diuraikan ke dalam seperangkat aturan praktis atau maksim spesifik yang menjadi tolok ukur operasional. Landasan teoretis ini umumnya merujuk pada pembagian maksim kesantunan yang mencakup maksim kebijaksanaan, maksim kemurahan, maksim penghargaan, maksim kesederhanaan, maksim kesetujuan, dan maksim kesimpatian. (Ni'am, 2020) mengemukakan bahwa tingkat kesantunan seseorang dapat diukur secara konkret melalui bentuk kepatuhan maupun pelanggaran terhadap maksim-maksim kesantunan tersebut dalam kegiatan berbahasa secara lisan maupun tulisan. Ketika penutur mampu meminimalkan ekspresi yang merugikan orang lain dan memaksimalkan apresiasi, maka tingkat kesantunan komunikasinya dinilai tinggi.

Namun demikian, dalam kehidupan sehari-hari, penerapan prinsip kesantunan dalam berkomunikasi tidak selalu bersifat tetap atau berjalan secara konsisten. Hal tersebut dipengaruhi oleh media komunikasi yang digunakan serta kondisi emosional penuturnya. Menurut (Nursita et al., 2022), penggunaan bahasa yang santun memang dapat mengurangi kemungkinan terjadinya konflik dalam komunikasi. Akan tetapi, ketika masyarakat berada dalam situasi krisis atau tekanan tertentu, penggunaan bahasa yang kurang santun cenderung meningkat. Kondisi ini menunjukkan bahwa pola komunikasi masyarakat mengalami perubahan, terutama ketika komunikasi yang awalnya dilakukan secara langsung atau tatap muka berpindah ke ruang digital yang lebih bebas dan terbuka.

Akibatnya, batas-batas etika berbahasa yang biasanya dijaga dalam komunikasi langsung menjadi lebih mudah diabaikan di media digital.

Ketidaksantunan Berbahasa

Ketidaksantunan berbahasa merupakan kebalikan dari kesantunan berbahasa dalam berkomunikasi. Ketidaksantunan ini dapat dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja sehingga menimbulkan kesalahpahaman, konflik, atau ketegangan dalam komunikasi. Dalam kajian pragmatik, ketidaksantunan biasanya muncul melalui penggunaan kata-kata atau ungkapan yang menyerang harga diri, citra diri, maupun kehormatan seseorang di hadapan orang lain. Menurut (Puspitasari et al., 2024) interaksi sosial di dunia maya tidak selalu berlangsung secara harmonis. Sebaliknya, komunikasi di media digital justru sering memunculkan tindakan yang dapat menyinggung atau merugikan orang lain karena kontrol sosial tidak sekuat komunikasi tatap muka. Selain itu, ketika batas-batas etika mulai melemah, banyak pengguna media sosial menggunakan bahasa yang tidak santun untuk merendahkan, menyerang, atau menjatuhkan lawan bicaranya.

Selain dipengaruhi oleh lemahnya kontrol sosial, penggunaan bahasa yang tidak santun juga sering dipicu oleh emosi yang tidak terkendali, terutama ketika seseorang menanggapi isu yang dianggap sensitif (Hidayah et al., 2024). Akibatnya, banyak netizen menggunakan kata-kata kasar, sindiran tajam, atau ungkapan yang merendahkan orang lain di media sosial.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa penggunaan bahasa kasar di media sosial mengalami perubahan fungsi. Jika sebelumnya kata-kata kasar dianggap tabu untuk diucapkan, kini kata-kata tersebut sering digunakan sebagai bentuk pelampiasan emosi, rasa kecewa, kemarahan, atau protes sosial yang disampaikan secara cepat dan spontan. Oleh karena itu, tindakan menyerang perasaan maupun kebebasan orang lain sering dilakukan secara terbuka tanpa memikirkan dampak psikologis yang dapat dirasakan oleh lawan tutur dalam jangka panjang (Utomo et al., 2024).

Lebih lanjut, maraknya ketidaksantunan di ruang digital tidak hanya berdampak pada etika komunikasi, tetapi juga memengaruhi kualitas penggunaan bahasa itu sendiri. Ketika seseorang lebih mengutamakan emosi dan kemarahan dalam berkomunikasi, penggunaan bahasa yang baik dan jelas sering kali diabaikan. Misalnya, kalimat menjadi tidak efektif, pemilihan kata kurang tepat, dan informasi yang disampaikan menjadi kabur atau sulit dipahami. Berdasarkan penelitian Putri et al (2025), penggunaan bahasa yang tidak santun di media sosial berkaitan dengan meningkatnya ketidakjelasan informasi dalam teks opini publik. Akibatnya, kritik atau pendapat yang sebenarnya penting justru kehilangan makna karena tertutupi oleh penggunaan kata-kata yang terlalu kasar dan menyerang.

Komunikasi Digital di Media Sosial X

Media sosial X telah berkembang menjadi ruang komunikasi digital yang digunakan masyarakat untuk menyebarkan informasi dengan sangat cepat. Selain itu, komunikasi di platform tersebut umumnya dilakukan melalui tulisan singkat sehingga pengguna harus menyampaikan pendapat secara ringkas dan langsung. Kondisi ini kemudian membentuk perilaku pengguna menjadi lebih spontan, mudah bereaksi, dan terkadang cenderung emosional ketika menanggapi suatu peristiwa. Menurut Putri & Utomo (2021) adanya kebebasan dan identitas yang tidak selalu terlihat secara jelas di media sosial membuat banyak remaja maupun netizen lebih berani menggunakan kata-kata kasar untuk menarik perhatian publik. Oleh sebab itu, media sosial X dapat dipahami sebagai ruang yang memperlihatkan berbagai bentuk perilaku bahasa masyarakat secara terbuka dan spontan tanpa banyak aturan formal (Rini et al., 2024).

Selain digunakan sebagai sarana komunikasi sehari-hari, media sosial X juga sering dimanfaatkan masyarakat untuk menyampaikan kritik dan protes sosial, terutama ketika terjadi bencana atau krisis nasional. Dalam situasi tersebut, masyarakat biasanya menggunakan media sosial untuk menyampaikan keluhan kepada pemerintah atau pihak yang dianggap bertanggung jawab. Ketika komunikasi resmi antara pemerintah dan masyarakat tidak berjalan dengan baik, ledakan komentar emosional di media sosial menjadi sulit dihindari. (Puspitasari et al., 2024) menyatakan bahwa pembahasan mengenai kebijakan publik di dunia maya sangat mudah memicu konflik bahasa karena adanya perbedaan antara harapan masyarakat dan kenyataan yang terjadi di lapangan.

Oleh karena itu, kajian mengenai ketidaksantunan berbahasa di media sosial X penting dilakukan untuk memahami cara masyarakat berkomunikasi di era digital sekaligus melihat bentuk kritik sosial yang muncul di tengah kehidupan modern (Ghani et al., 2025).

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan metodologis deskriptif kualitatif dan pendekatan teoretis pragmatis. Pendekatan deskriptif kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam fenomena ketidaksantunan berbahasa yang dilakukan oleh netizen terhadap kinerja pemerintah dalam penanganan banjir di Sumatera melalui media sosial X. Menurut Sugiyono (2010), pendekatan kualitatif disebut sebagai pendekatan interpretif, karena penelitian ini menekankan pada interpretasi terhadap data yang diperoleh di lapangan, yang kemudian dijadikan tulisan (Adillah et al., 2022).

Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemaknaan, interpretasi, serta analisis konteks tuturan, bukan pada pengukuran kuantitatif. Hal ini sejalan dengan pendapat Sugiyono (2019) yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena bahasa secara holistik melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata (Lestari et al., 2026).

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, karena penelitian ini berusaha menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta karakteristik objek yang diteliti. Dalam konteks ini, objek penelitian berupa tuturan netizen yang mengandung unsur ketidaksantunan berbahasa di media sosial X. Penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis, melainkan untuk mengidentifikasi, mengklasifikasikan, serta menganalisis bentuk dan strategi ketidaksantunan yang muncul dalam data.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer berupa tuturan atau komentar netizen yang diambil dari media sosial X yang berkaitan dengan isu kinerja pemerintah dalam penanganan banjir di Sumatera. Data tersebut dipilih karena mencerminkan penggunaan bahasa secara natural dalam situasi komunikasi digital. Sementara itu, data sekunder berupa referensi teoritis yang diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan kajian pragmatik, khususnya terkait kesantunan dan ketidaksantunan berbahasa.

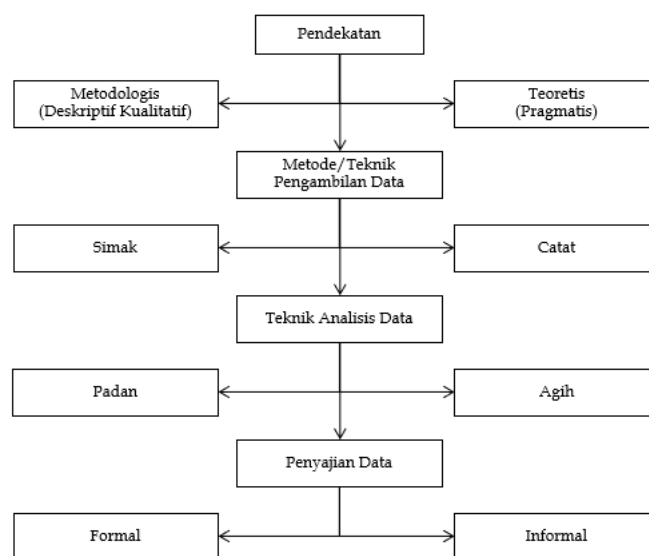
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode simak dengan teknik lanjutan berupa teknik catat. Metode simak digunakan dengan cara mengamati secara langsung penggunaan bahasa dalam media sosial X tanpa terlibat dalam proses komunikasi tersebut. Peneliti melakukan penelusuran terhadap unggahan yang berkaitan dengan topik penelitian, kemudian mengidentifikasi komentar-komentar yang mengandung unsur ketidaksantunan.

Selanjutnya, teknik catat dilakukan dengan cara mendokumentasikan tuturan yang relevan ke dalam bentuk data tertulis untuk dianalisis lebih lanjut. Dalam proses ini, peneliti juga melakukan seleksi data berdasarkan kriteria tertentu, yaitu tuturan yang mengandung pelanggaran prinsip kesantunan, penggunaan kata makian, atau bentuk tindak pengancaman muka. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (human instrument), yang berperan dalam menentukan fokus penelitian, memilih data, mengumpulkan data, serta melakukan analisis dan interpretasi. Selain itu, peneliti juga menggunakan instrumen pendukung berupa tabel klasifikasi data yang digunakan untuk mengelompokkan jenis-jenis ketidaksantunan berdasarkan kategori tertentu, seperti pelanggaran maksim kesantunan dan strategi ketidaksantunan.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode padan pragmatis dan metode agih. Metode padan pragmatis digunakan untuk menganalisis makna tuturan berdasarkan konteks penggunaannya, terutama dalam mengidentifikasi bentuk pelanggaran prinsip kesantunan dan tindak pengancaman muka. Sementara itu, metode agih digunakan untuk menganalisis struktur bahasa dalam tuturan, seperti bentuk kata, frasa, dan kalimat yang mengandung unsur ketidaksantunan. Proses analisis data dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan.

Pada tahap selanjutnya yaitu teknik penyajian data, pada tahap ini peneliti menyajikan data hasil temuan dengan dua cara, yaitu dalam bentuk formal dan informal. Melalui teknik formal, data disajikan dalam bentuk tabel agar pola dan kategorinya mudah terlihat. Sementara itu, melalui teknik informal, peneliti menjelaskan isi tabel tersebut menggunakan uraian kalimat yang runtut dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi teori, yaitu membandingkan hasil analisis dengan berbagai teori yang relevan dalam kajian pragmatik dan kesantunan berbahasa. Selain itu, peneliti juga melakukan pengecekan ulang terhadap data yang telah dianalisis untuk memastikan konsistensi dan keakuratan hasil penelitian. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan memiliki validitas yang tinggi serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Melalui langkah-langkah tersebut, penelitian ini dilakukan secara sistematis mulai dari pengumpulan data hingga analisis, sehingga mampu menghasilkan deskripsi yang komprehensif mengenai fenomena ketidaksantunan berbahasa netizen di media sosial X dalam konteks kritik terhadap kinerja pemerintah.



Gambar 1. Diagram Alur Penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti, ditemukan ketidaksantunan berbahasa atau pelanggaran prinsip kesantunan menurut teori Leech menggunakan 10 maksim yang dianalisis dari komentar netizen terhadap kinerja pemerintah dalam penanganan banjir Sumatera di media sosial X, yaitu ditemukan 2 tuturan yang mengandung pelanggaran maksim kebijaksanaan, 5 tuturan mengandung pelanggaran maksim penerimaan, 21 tuturan mengandung pelanggaran maksim kemurahan, 7 tuturan mengandung pelanggaran maksim kerendahan hati, 12 tuturan mengandung pelanggaran maksim kesetujuan, 12 tuturan mengandung pelanggaran maksim kesimpatian, 2 tuturan mengandung pelanggaran maksim permintaan maaf, 5 tuturan mengandung pelanggaran maksim pemberian maaf, 18 tuturan mengandung pelanggaran maksim perasaan, dan 18 tuturan mengandung pelanggaran maksim berpendapat.

Tabel 1. Data Hasil Penelitian Pelanggaran Prinsip Kesantunan Komentar Netizen terhadap Kinerja Pemerintah dalam Penanganan Banjir Sumatera di Media Sosial X.

No.	Pelanggaran Maksim	Jumlah Tuturan
1	Maksim Kebijaksanaan	2
2	Maksim Penerimaan	5
3	Maksim Kemurahan	21
4	Maksim Kerendahan Hati	7
5	Maksim Kesetujuan	12
6	Maksim Kesimpatian	12
7	Maksim Permintaan Maaf	2
8	Maksim Pemberian Maaf	5
9	Maksim Perasaan	18
10	Maksim Berpendapat	18
Jumlah		102

Berdasarkan data yang telah didapatkan dengan melakukan pengelompokan pelanggaran prinsip kesantunan berdasarkan jenis maksim yang telah ditemukan, yaitu maksim kebijaksanaan, maksim penerimaan, maksim kemurahan, maksim kerendahan hati, maksim kesetujuan, maksim kesimpatian, maksim permintaan maaf, maksim pemberian maaf, maksim perasaan, dan maksim berpendapat, maka dapat dijabarkan sebagai berikut ini.

Maksim Kebijaksanaan

Menurut Utomo (2020), maksim kebijaksanaan mewajibkan peserta tutur untuk memprioritaskan kepentingan mitra tutur dengan cara meminimalkan kerugian dan memaksimalkan manfaat bagi mereka.

Inti dari prinsip ini adalah menjaga agar tuturan tidak memberikan beban atau kesulitan bagi lawan bicara. Sebaliknya, apabila penutur menyampaikan tuntutan atau perintah yang menyudutkan posisi mitra tutur, maka telah terjadi pelanggaran maksim kebijaksanaan sebagaimana tercermin dalam data berikut.

Konteks : Dalam tuturan tersebut terdapat interaksi antara netizen dengan akun *Kompas.com* yang memberitakan seorang menteri saat membagikan bantuan kemanusiaan pasca bencana yang dinilai oleh masyarakat sebagai pencitraan belaka

Netizen 1 : “tlg pak ksh dia 5 tronton beras, please”

Netizen 2 : “Kita menunggu beliau panggul kayu gelondongan.”

Netizen 3 : “...Benahi segera!”

Tuturan tersebut menunjukkan pelanggaran maksim kebijaksanaan karena netizen menyampaikan tuntutan dan perintah yang bersifat memberatkan serta menyudutkan mitra tutur. Penggunaan kalimat perintah (imperatif) seperti "Benahi segera!" atau permintaan sarkastik untuk memanggul "5 tronton beras" dan "kayu gelondongan" merupakan bentuk upaya memaksimalkan kerugian (beban) bagi lawan tutur. Secara pragmatik, tuturan ini tidak mempertimbangkan keuntungan atau kenyamanan mitra tutur, melainkan sengaja dirancang untuk memberikan tekanan psikologis dan merendahkan wibawa lawan tutur di ruang publik (Ariyadi et al., 2021).

Secara kualitatif, tuntutan ini sengaja dibuat netizen sebagai bentuk tekanan psikologis untuk meruntuhkan wibawa pemerintah di media sosial. Jika dikaitkan dengan penelitian terdahulu oleh Yustiani et al (2024), fenomena ini merupakan bentuk strategi ketidaksantunan yang digunakan sebagai perlawanan verbal untuk melakukan tindak pengancaman muka, baik muka positif maupun negatif, terhadap otoritas. Melalui pembebanan verbal yang agresif ini, netizen memanfaatkan karakteristik media sosial X yang terbuka untuk membalikkan hierarki kekuasaan antara warga negara dan pemangku kebijakan (Rosyada et al., 2024).

Maksim Penerimaan

Maksim penerimaan mengharuskan penutur untuk bersikap dermawan dengan cara menekan sekecil mungkin keuntungan diri sendiri dan memperbesar pengorbanan atau kerugian pribadi dalam berkomunikasi.

Menurut Chaer (2010), maksim penerimaan menetapkan standar kesantunan berdasarkan kerelaan penutur untuk meminimalkan keuntungan pribadi dan justru memaksimalkan beban atau kerugian bagi diri sendiri. Adapun bentuk pengabaian terhadap prinsip tersebut tercermin dalam contoh di bawah ini.

Konteks : Dalam tuturan tersebut terjadi sebuah reaksi ketika netizen mengomentari berita dokumentasi penyaluran bantuan logistik oleh kementerian terkait yang dinilai oleh banyak netizen sebagai suatu bentuk “panggung” yang dibuat oleh kelompok tertentu.

Netizen 1 : “Fee dari proyek² mitra WB harum pak Ted”

Netizen 2 : “...hanya menyalurkan rasa sakit hati kalah pilpres...”

Data tersebut melanggar maksim penerimaan karena penutur memberikan tuduhan bahwa lawan tutur sedang memaksimalkan keuntungan pribadi (baik berupa materi maupun pemulihan citra). Penutur tidak melihat adanya pengorbanan yang tulus, melainkan sebuah upaya strategis untuk kepentingan diri sendiri. Hal ini bertentangan dengan prinsip maksim penerimaan yang menghendaki peserta tutur untuk meminimalkan keuntungan diri sendiri dalam setiap tindakannya.

Secara kualitatif, pelanggaran ini mencerminkan adanya ketidakpercayaan publik yang akut terhadap aksi filantropi politik di tengah situasi bencana. Jika dikaitkan dengan penelitian terdahulu oleh Maharani & Utomo (2020), kecenderungan netizen untuk langsung menyerang motif politis ini sering kali memicu ketidakefektifan kalimat yang justru mengaburkan substansi kritik objektif yang ingin disampaikan. Akibatnya, esensi komunikasi yang seharusnya berfungsi sebagai media penyampai gagasan yang harmonis Anggraeni et al (2022) bergeser menjadi anomali konfrontatif akibat dominasi prasangka netizen terhadap keuntungan sepihak penguasa.

Maksim Kemurahan

Merujuk pada Chaer (2010), maksim kemurahan menetapkan bahwa kesantunan berbahasa dicapai dengan cara menunjukkan apresiasi setinggi mungkin kepada lawan tutur. Prinsip ini mewajibkan setiap peserta komunikasi untuk menonjolkan rasa hormat serta menjauhi tindakan verbal yang bersifat merendahkan, seperti mencela atau mengejek. Adapun bentuk pengabaian terhadap nilai-nilai penghormatan ini dapat diamati pada data berikut.

Konteks : Dalam tuturan tersebut terdapat sebuah reaksi kemarahan netizen terhadap kinerja biokrasi pemerintah di kolom komentar berita mengenai bencana alam banjir

Netizen 1 : “Pejabat tai... Bangsat”

Netizen 2 : “Asu asu, pencitraan terus”

Tuturan yang disampaikan oleh para netizen tersebut merupakan bentuk pelanggaran berat terhadap maksim kemurahan karena mengandung kata-kata tabu dan makian kasar. Penggunaan diksi seperti "bangsat" dan "asu" menunjukkan kegagalan penutur dalam memaksimalkan rasa hormat dan meminimalkan rasa tidak hormat kepada orang lain. Tindakan verbal ini tidak memenuhi kriteria kesantunan karena secara eksplisit bertujuan untuk menjatuhkan dan merendahkan martabat lawan tutur.

Secara kualitatif, penggunaan kata makian kasar ini menunjukkan runtuhnya filter etika penutur akibat luapan emosi yang tidak terkendali di ruang siber. Jika dikaitkan dengan penelitian terdahulu oleh Nadzifah & Utomo (2023), rendahnya penghargaan terhadap tokoh publik di media sosial memang ditandai oleh dominasi pelanggaran maksim penghargaan/kemurahan di kolom komentar. Fenomena ini dipertegas Fatihah & Utomo (2020) yang menyatakan bahwa netizen memiliki kecenderungan kuat menggunakan kata makian secara masif untuk mengutarakan frustrasi kolektif mereka ketika merespons isu-isu sosiopolitik yang sensitif.

Maksim Kerendahan Hati

Maksim kerendahan hati menuntut penutur untuk senantiasa menjaga kesantunan dengan cara membatasi pujian terhadap diri sendiri. Merujuk pada pemikiran Chaer (2010), prinsip ini mengharuskan peserta tutur untuk meminimalkan sikap menonjolkan diri dan sebaliknya, memaksimalkan sikap rendah hati atau "merendahkan" posisi diri sendiri di hadapan mitra tutur. Bentuk pengabaian terhadap kaidah kerendahan hati ini dapat diamati pada contoh tuturan di bawah ini.

Konteks : Dalam tuturan tersebut terdapat reaksi penolakan yang dilakukan oleh netizen terhadap sorotan gaya kepemimpinan pejabat di X yang dianggap netizen sebagai upaya pencarian validasi yang tidak etis di tengah suasana duka.

Netizen 1 : “**Di kira kren** apa gitu, ada kena hujat”

Netizen 2 : “Pemerintahan **Angkuh**. Rakyat menjadi korban keangkuhan kebijakan.”

Tuturan tersebut mengindikasikan pelanggaran maksim kerendahan hati karena adanya serangan terhadap sifat subjek yang dianggap tidak rendah hati. Penutur menggunakan diksi "angkuh" untuk melabeli lawan tutur, yang secara pragmatik menunjukkan adanya ketidakhormatan terhadap citra diri lawan tutur yang dianggap pamer atau sombong. Interaksi ini gagal memenuhi tuntutan maksim kerendahan hati yang seharusnya mengedepankan sikap rendah diri dalam berkomunikasi.

Secara kualitatif, netizen melakukan dekonstruksi terhadap narsisme visual yang kerap ditampilkan pejabat publik saat menyalurkan bantuan bencana. Jika dikaitkan dengan penelitian terdahulu oleh Anggraeni et al (2024), tindakan memamerkan perilaku secara berlebihan di ruang publik digital dapat merusak prasyarat utama keharmonisan relasi sosial. Netizen mendeteksi adanya keangkuhan perilaku dari dokumentasi tersebut, sehingga melontarkan kritik sinis yang bertindak sebagai alat pengancaman muka untuk memaksa otoritas kembali pada prinsip kesederhanaan (Fadilah et al., 2024).

Maksim Kesetujuan

Menurut Chaer (2010), maksim kesetujuan menuntut adanya keselarasan dan sikap saling menghormati antara peserta tutur terhadap pesan yang disampaikan. Prinsip ini menekankan agar penutur dan lawan tutur senantiasa memperbesar ruang kesepakatan serta menekan potensi perbedaan pendapat di antara mereka. Adapun bentuk pengabaian terhadap prinsip kesantunan ini dapat diamati dalam data tuturan di bawah ini.

Konteks : Dalam tuturan ini ditemukan penolakan dan perlawanan netizen terhadap pernyataan resmi pemerintah mengenai status kedaruratan bencana banjir di Sumatera yang diunggah oleh akun *Kompas.com* di X.

Netizen 1 : “**Bagus** niru kisah Umar bin Khattab”

Netizen 2 : “**Konsultan pencitraannya** siapa ya?”

Data di atas menunjukkan pelanggaran maksim kesetujuan melalui penggunaan ironi dan sarkasme. Meskipun secara harfiah kata "bagus" bermakna positif, namun dalam konteks ini penutur bermaksud menyindir dan menunjukkan ketidaksetujuan yang tajam terhadap aksi yang dilakukan subjek. Hal ini melanggar penerapan maksim kesetujuan karena penutur tidak berupaya membangun kesepahaman, melainkan justru memperlebar jarak ketidaksetujuan melalui sindiran terhadap keaslian niat lawan tutur.

Secara kualitatif, pengungkapan ketidaksetujuan secara tidak langsung ini merupakan strategi komunikasi konfrontatif untuk menjatuhkan legitimasi argumen pemerintah. Jika dikaitkan dengan penelitian terdahulu oleh Ni'am & Utomo (2020), perbedaan argumen dalam dialog publik digital sering kali tidak lagi mengedepankan logika ilmiah, melainkan strategi ketidaksantunan pragmatik untuk mendelegitimasi lawan tutur. Penggunaan metafora sarkastik yang ekstrem (seperti menyamakan pemangku kebijakan dengan Netanyahu) menjadi bukti kualitatif bahwa netizen sengaja menciptakan jarak oposisi yang radikal demi menyerang muka positif pemerintah (Andini et al., 2022).

Maksim Kesimpatian

Maksim kesimpatian mewajibkan setiap peserta tutur untuk memperbesar rasa kepedulian serta menekan segala bentuk sentimen negatif terhadap lawan bicara. Dalam konteks kesantunan berbahasa, prinsip ini menekankan pentingnya dukungan moral dengan cara memaksimalkan sikap solider dan meminimalkan rasa antipati. Adapun bentuk pengabaian atau pelanggaran terhadap kaidah ini dapat dicermati melalui data berikut.

Konteks : Dalam tuturan ini ditemukan luapan antipati siber terhadap rilis video penjelasan atau klarifikasi pihak pemerintah mengenai alasan penolakan status pada bencana banjir yang langsung direspon oleh netizen dengan hilangnya rasa simpati interpersonal.

Netizen 1 : **“Memuakkan”**

Netizen 2 : “Teddy, kau bikin **muak**.”

Komentar netizen tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran maksim kesimpatian karena menunjukkan rasa antipati yang ekstrem. Penggunaan kata "muak" menandakan hilangnya rasa simpati terhadap upaya atau keberadaan lawan tutur. Penutur secara sadar mempertahankan pernyataan yang bernada antipati, yang menunjukkan tidak adanya upaya untuk menyelaraskan perasaan atau berempati terhadap situasi yang sedang dikomunikasikan. Hal ini secara pragmatik tidak sejalan dengan penerapan prinsip kesantunan berbahasa yang mengedepankan dukungan moral dan rasa simpati.

Secara kualitatif, hilangnya rasa simpati dari netizen ini dipicu oleh kegagalan komunikasi krisis dari pemerintah yang dianggap tidak peka terhadap penderitaan riil masyarakat. Jika dikaitkan dengan penelitian terdahulu oleh Utomo (2021), dialog publik di media sosial sering kali gagal berjalan efektif karena netizen mengabaikan perasaan mitra tutur dan memilih melampiaskan antipati secara absolut. Luapan rasa muak ini menjadi representasi dari degradasi nilai sosiolinguistik di ruang digital (Lestari & Assidik, 2024), di mana rasa hormat dan simpati interpersonal terkikis oleh rasa frustrasi kolektif terhadap lambatnya respons penanganan bencana.

Maksim Permintaan Maaf

Maksim permintaan maaf (*Obligation of S to O Maxim*) menuntut penutur untuk senantiasa menjaga kesantunan dengan cara memaksimalkan rasa tanggung jawab terhadap kesalahan atau tindakan kurang berkenan yang telah dilakukannya kepada mitra tutur. Merujuk pada pemikiran Chaer (2010), prinsip ini mengharuskan peserta tutur untuk meminimalkan sikap membela diri dan sebaliknya, memaksimalkan sikap mengakui kekhilafan serta berupaya memulihkan hubungan interpersonal yang sempat terganggu. Bentuk pengabaian terhadap kaidah permintaan maaf ini dapat diamati pada contoh tuturan di bawah ini.

Konteks : Dalam tuturan ini berisi kaitan antara akuntabilitas moral yang dilayangkan oleh netizen kepada jajaran kabinet pemerintah di kolom komentar X berita penanganan bencana.

Netizen 1 : "saat nya menebus dosa....ampunkanlah aku"

Netizen 2 : "Dia pikir dgn manggul satu karung beras sdh bs menghapus dosa²nya..."

Komentar netizen tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran maksim permintaan maaf karena menunjukkan tuntutan dan sindiran atas nihilnya penyesalan resmi dari subjek. Penggunaan kata "menebus dosa" menandakan hilangnya esensi tanggung jawab moral dan tidak adanya permohonan maaf yang tulus dari pelaku tindakan. Penutur secara sadar mempertahankan pernyataan yang bernada menghakimi, yang menunjukkan tidak adanya upaya untuk mengakui kesalahan terhadap situasi yang sedang dikomunikasikan. Hal ini secara pragmatik tidak sejalan dengan penerapan prinsip kesantunan berbahasa yang mengedepankan pengakuan kesalahan dan pemulihan harmoni tutur.

Secara kualitatif, tuturan ini mengindikasikan adanya tuntutan pertanggungjawaban etis yang dinilai publik sengaja diabaikan oleh otoritas. Jika dikaitkan dengan penelitian terdahulu oleh Sajida et al (2024), kegagalan instansi atau tokoh publik dalam mematuhi maksim permintaan maaf secara jujur di masa krisis sering kali memicu kekecewaan yang berdampak pada ketidakefektifan kalimat kritik dari netizen.

Maksim Pemberian Maaf

Maksim pemberian maaf (*Obligation of O to S Maxim*) menuntut penutur untuk senantiasa menjaga kesantunan dengan cara merespons permohonan maaf atau upaya baik dari mitra tutur secara proporsional. Merujuk pada pemikiran Chaer (2010), prinsip ini mengharuskan peserta tutur untuk meminimalkan rasa dendam atau antipati berkelanjutan dan sebaliknya, memaksimalkan sikap memaklumi serta menerima penyesalan lawan tutur dengan penuh pengertian demi menjaga keharmonisan relasi sosial. Bentuk pengabaian terhadap kaidah pemberian maaf ini dapat diamati pada contoh tuturan di bawah ini.

Konteks : Dalam tuturan ini ditemukan bentuk penolakan netizen terhadap program pemulihan bencana yang digagas oleh pemerintah.

Netizen 1 : "GK akan hapus dosa² yg di akibatkan perbuatan mu dulu"

Netizen 2 : "kok jadi nya si Kipli ini pura pura baik... GK akan hapus dosa² yg di akibatkan perbuatan mu dulu"

Komentar netizen tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran maksim pemberian maaf karena menunjukkan penonjolan resistensi dan penolakan mutlak untuk memberikan pengampunan. Penggunaan frasa "Gak akan hapus" menandakan hilangnya rasa pemakluman dan ketidakmauan untuk memaafkan kesalahan masa lalu lawan tutur. Penutur secara sadar mempertahankan pernyataan yang bernada menutup pintu rekonsiliasi, yang menunjukkan tidak adanya upaya untuk memaklumi kesalahan dengan cara yang santun, sabar, atau penuh pengertian terhadap situasi yang sedang dikomunikasikan. Hal ini secara pragmatik tidak sejalan dengan penerapan prinsip kesantunan berbahasa yang mengedepankan sikap saling menghargai dan pemeliharaan keharmonisan relasi sosial.

Secara kualitatif, penolakan pemberian maaf ini mencerminkan bekerjanya memori digital publik (*digital public memory*) yang menolak melupakan dampak destruktif dari kebijakan masa lalu tokoh terkait. Jika dikaitkan dengan penelitian terdahulu oleh Jayanti dan Subyantoro (2019), keteguhan netizen untuk tidak memberikan maaf merupakan strategi perlawanan verbal yang sengaja diproduksi sebagai tindakan pengancaman muka secara permanen.

Maksim Perasaan

Maksim perasaan (*Feeling Reticence Maxim*) menuntut penutur untuk senantiasa menjaga kesantunan dengan cara mengendalikan luapan emosi pribadinya agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Merujuk pada pemikiran Sugiyono (2010), prinsip ini mengharuskan peserta tutur untuk meminimalkan ekspresi emosi negatif (seperti kemarahan, kekecewaan, atau kejengkelan) secara meledak-ledak dan sebaliknya, memaksimalkan sikap menahan diri atau meredam perasaan aslinya demi menjaga kenyamanan psikologis di ruang publik. Bentuk pengabaian terhadap kaidah perasaan ini dapat diamati pada contoh tuturan di bawah ini.

Konteks : Dalam tuturan tersebut terdapat reaksi emosional oleh netizen yang terjadi di kolom balasan X yang berisi cuplikan video wawancara pemerintah saat memberikan respon mengenai penundaan bantuan bencana banjir.

Netizen 1 : "Jijik anjing gw lgi makan, liat si teddy melehoy ngomong air ludhanya di sudut bibir Pueh"

Netizen 2 : "Geleuh ngabudah"

Netizen 3 : "Pngen ludahin mukanya cuihhhh !!!"

Komentar netizen tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran maksim perasaan karena menunjukkan luapan emosi negatif dan kejengkelan pribadi yang meledak-ledak.

Penggunaan kata "jijik" menandakan hilangnya pengendalian emosi serta ketidakmampuan untuk menahan kemarahan di ruang publik. Penutur secara sadar mempertahankan pernyataan yang bernada mencela secara ekstrem, yang menunjukkan tidak adanya upaya untuk menyembunyikan, meredam, atau melembutkan perasaan asli demi menjaga kenyamanan emosional mitra tutur terhadap situasi yang sedang dikomunikasikan. Hal ini secara pragmatik tidak sejalan dengan penerapan prinsip kesantunan berbahasa yang mengedepankan penahanan diri dan pelunakan ekspresi emosional.

Secara kualitatif, luapan kejengkelan yang radikal ini merepresentasikan runtuhnya batas etika siber hingga memasuki ranah pelecehan personal (*body shaming*). Jika dikaitkan dengan penelitian terdahulu oleh Anggraeni et al (2024), situasi krisis akibat bencana alam regional yang memicu rasa frustrasi kolektif terbukti melahirkan penggunaan kata makian dan ekspresi emosi mentah yang tidak terkontrol di Twitter.

Maksim Berpendapat

Maksim berpendapat (*Opinion Reticence Maxim*) menuntut penutur untuk senantiasa menjaga kesantunan dengan cara membatasi keangkuhan argumen pribadinya agar tidak terkesan mendikte lawan tutur. Merujuk pada pemikiran Chaer (2010), prinsip ini mengharuskan peserta tutur untuk meminimalkan pemaksaan opini atau keyakinan subjektif secara mutlak-berlebihan dan sebaliknya, memaksimalkan penggunaan nada keraguan yang sopan (*hedging*) serta tetap membuka ruang bagi perspektif orang lain. Bentuk pengabaian terhadap kaidah berpendapat ini dapat diamati pada contoh tuturan di bawah ini.

Konteks : Dalam tuturan tersebut ditemukan perdebatan mengenai motif politik di balik penolakan bantuan kemanusiaan oleh pemerintah daerah di kolom komentar X.

Netizen 1 : "Belum mau krn takut diaudit. Dah gitu aja."

Netizen 2 : "Pejabat indon nih dongok atau gimana? ... jadi keliatan bloon"

Netizen 3 : "Iyalah... Entar jelas ketahuan penyebab bencana krn hasil konsesi."

Komentar netizen tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran maksim berpendapat karena menunjukkan penonjolan opini pribadi yang bersifat mutlak dan menghakimi sepihak. Penggunaan frasa "Dah gitu aja" menandakan hilangnya nada keraguan yang sopan (*hedging*) serta keengganan untuk bersikap rendah hati dalam berargumen. Penutur secara sadar mempertahankan pernyataan yang bernada mendikte dan kaku, yang menunjukkan tidak adanya upaya untuk mengerem ego atau membuka ruang bagi perspektif orang lain terhadap situasi yang sedang dikomunikasikan. Hal ini secara pragmatik tidak sejalan dengan penerapan prinsip kesantunan berbahasa yang mengedepankan kelonggaran berpendapat dan fleksibilitas dialogis.

Secara kualitatif, pola penuturan ini memotret fenomena keangkuhan netizen yang memosisikan spekulasi atau tuduhan pribadinya sebagai kebenaran final yang dogmatis. Jika dikaitkan dengan penelitian terdahulu oleh (Melani & Utomo, 2022) serta (Rahmasari & Utomo, 2021), pengungkapan opini mutlak yang dicampur dengan kata makian kasar (dongok, bloon) ini berimplikasi langsung pada rendahnya kualitas diskursus publik dan melahirkan ketidakefektifan penyampaian aspirasi.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa terdapat 102 bentuk ketidaksantunan berbahasa yang dilakukan netizen di media sosial X dalam merespons kinerja pemerintah terkait penanganan banjir di Sumatera, yang mencakup pelanggaran pada seluruh maksim kesantunan menurut teori Leech. Temuan menunjukkan bahwa maksim kemurahan menjadi jenis pelanggaran yang paling dominan dengan 21 tuturan, diikuti oleh maksim berpendapat (18 tuturan), maksim perasaan (18 tuturan), maksim kesetujuan (12 tuturan), maksim kesimpatian (12 tuturan), maksim kerendahan hati (7 tuturan), maksim penerimaan (5 tuturan), maksim pemberian maaf (5 tuturan), maksim permintaan maaf (2 tuturan), dan maksim kebijaksanaan (2 tuturan).

Maraknya penggunaan makian dan hinaan oleh netizen menunjukkan bahwa maksim kemurahan sering kali diabaikan demi menyuarakan kritik emosional yang menyerang wibawa pemerintah. Fenomena di ruang publik digital X ini mengonfirmasi bahwa saat terjadi bencana alam, komunikasi cenderung bersifat agresif dan jauh dari prinsip kesantunan. Akibatnya, terjadi degradasi moral dalam berbahasa yang justru menghambat efektivitas pesan atau aspirasi yang ingin disampaikan masyarakat kepada pemangku kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Acara, P., Corona, R., Publik, D. A. N. K., Studi, P., Bahasa, P., Bahasa, F., & Semarang, U. N. (2021). *Jurnal Bahasa, Sastra Indonesia, dan Pengajarannya*. 14(April), 28–36.
- Adillah, R. U., Muhtarom, I., & Sugiarti, D. H. (2022). Analisis kesantunan berbahasa dalam novel *Menggapai Matahari* karya Adnan Katino. *Bahtera Indonesia; Jurnal Penelitian Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 7(1), 272–288.
- Alya Luthfi Ghani, Azhar Aji Winanda, Dina Handayani Safila Putri, Indri Triani, Mesya Viola Dwi Cahyani, Asep Purwo Yudi Utomo, Rossi Galih Kesuma, & Didi Pramono. (2025). Analisis Tindak Tutur Direktif dalam Video Pembelajaran Kurikulum Merdeka pada Channel Youtube Inspirasi Guru. *Fonologi: Jurnal Ilmuan Bahasa Dan Sastra Inggris*, 3(1), 160–198. <https://doi.org/10.61132/fonologi.v3i1.1435>
- Andini, D. A., Setyaningrum, A., & Utomo, A. P. Y. (2022). Analisis tindak tutur ilokusi dan perlokusi dalam konpres Menteri Kesehatan RI mengenai vaksin Covid-19 pada saluran YouTube Kementerian Kesehatan. *Prawara: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 3(2), 129–144.

- Anggraeni, N., Istiqomah, E., Fitriana, A. D. N., Hidayat, R., & Utomo, A. P. Y. (2022). Analisis tindak tutur perlokusi pada dialog film *Story of Kale: When Someone's in Love*. *PUSTAKA: Jurnal Bahasa Dan Pendidikan*, 2(4), 1–20.
- Anggraeni, N. O., Aisah, S., Khasanah, A. M., Yusriyya, S., Utomo, A. P. Y., Kesuma, R. G., & Santosa, P. P. P. (2024). Ujaran Positif Dalam Unggahan Akun di Media Sosial Instagram@ Biopsikologidynamis: Kajian Pragmatik. *Dinamika Pembelajaran: Jurnal Pendidikan Dan Bahasa*, 1(2), 18–34.
- Ariyadi, A. D., HP, M. K., & Utomo, A. P. Y. (2021). Analisis Tindak Tutur Ilokusi Film Pendek "Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini The Series Eps 01" Pada Kanal Youtube Toyotaindonesia. *Sarasvati*, 3(2), 215–227.
- Ariyadi, A. D., & Utomo, A. P. Y. (2020). Analisis Kesalahan Sintaksis pada Teks Berita Daring berjudul Mencari Etika Elite Politik di saat Covid-19. *Jurnal Bahasa Dan Sastra*, 8(3), 138. <https://doi.org/10.24036/jbs.v8i3.110903>
- Asriani, A. U., Juanda, J., & Jährir, A. S. (2025). Bahasa Dagang di Era Digital: Analisis Tindak Tutur dalam Live Streaming Shopping. *DEIKTIS: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra*, 5(4), 6031–6042.
- Ayuningdyas, A., Pujiatmoko, L., Ningrum, M. W., Farell, M., Saputra, R. Z., Widiyanto, T., Purwo, A., Utomo, Y., Kurnianto, H., & Riyanto, A. (2025). Analisis Tindak Tutur Representatif dalam Unggahan Video Edukasi Sains pada Saluran Media Sosial Youtube Fajrul Fx. *Student Research Journal*, 301–333. <https://doi.org/10.55606/srjyappi.v3i1.1775>
- Dinda Puspita Rini, Muhammad Farchan Muntaha, Sunaryo Sunaryo, Kholifatun Nisya, Mutia Basinu, Asep Purwo Yudi Utomo, & Rossi Galih Kesuma. (2024). Analisis Tindak Tutur Ekspresif Dan Direktif Dalam Video Debat Pembelajaran Bahasa Indonesia Kelas X Pada Channel Youtube Guru Gokil Kita. *Pragmatik: Jurnal Rumpun Ilmu Bahasa Dan Pendidikan*, 2(2), 19–32. <https://doi.org/10.61132/pragmatik.v2i2.397>
- Fadilah, E., Widyatama, A. M., Ihsani, I., Samudra, R., Utomo, A. P. Y., Islamy, A. B. D., & Kesuma, R. G. (2024). Analisis Tindak Tutur Representatif Coki Pardede Dalam Tayangan Video Why So Serious? Pada Kanal Youtube Malaka Project. *Mutiara: Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah*, 2(4), 255–277.
- Faroh, S., & Utomo, A. P. Y. (2020). Analisis tindak tutur ilokusi dalam vlog Q&A sesi 3 pada kanal youtube Sherly Annavita Rahmi. *UNDAS: Jurnal Hasil Penelitian Bahasa Dan Sastra*, 16(2), 311–326.
- Fatihah, A. C., & Utomo, A. P. Y. (2020). Analisis tindak tutur perlokusi dalam konpers Presiden soal COVID-19 pada saluran Youtube CNN Indonesia. *METAMORFOSIS| Jurnal Bahasa, Sastra Indonesia Dan Pengajarannya*, 13(1), 1–10.
- Fauziyyah, I. A., Ramadhan, S., Lestari, P., Pramesti, A., Alhuwaida, Z., Purwo, A., Utomo, Y., Maharani, A. T., Bahasa, P., & Semarang, U. N. (2026). *Tindak Tutur Representatif dan Direktif pada Daftar Putar Belajar Jadi MC dalam Kanal Youtube Maya Rachma*. 4(April).
- Jayanti, M., & Subyantoro, S. (2019). Pelanggaran Prinsip Kesantunan Berbahasa pada Teks di Media Sosial. *Jurnal Sastra Indonesia*, 8(2), 119–128. <https://doi.org/10.15294/jsi.v8i2.33718>
- Lestari, D., Sahidin, D., & Kulsum, U. (2026). ANALISIS KESANTUNAN BERBAHASA WARGANET DALAM EPILOG MENSREA: STUDI KASUS KOMENTAR

YOUTUBE PANDJIE PRAGIWAKSONO. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 11(02), 190–202.

- Lestari, M. A., & Assidik, G. K. (2024). Pelanggaran Prinsip Kesantunan Berbahasa Warganet pada Kolom Komentar Akun Instagram@ aniesbaswedan. *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa, Dan Sastra*, 10(1), 655–666.
- Maharani, A. T., & Utomo, A. P. Y. (2020). Analisis Tindak Tutur Lokusi dalam Akun Twitter Fiersa Besari. *Metafora: Jurnal Pembelajaran Bahasa Dan Sastra*, 6(1), 86–101.
- Mega Ayu Lestari, & Gallant Karunia Assidik. (2024). Pelanggaran Prinsip Kesantunan Berbahasa Warganet pada Kolom Komentar Akun Instagram @aniesbaswedan. *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa, Dan Sastra*, 10(1), 655–666. <https://doi.org/10.30605/onoma.v10i1.3337>
- Melani, M. V., & Utomo, A. P. Y. (2022). Analisis tindak tutur ilokusi akun Baksosapi.gapakemicin dalam unggahan di Instagram (Suatu analisis pragmatik). *GHANCARAN: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 3(2), 250–259.
- Musthofa, D., & Utomo, A. P. Y. (2021). Kesantunan berbahasa indonesia dalam tindak tutur ilokusi pada acara Rosi (Corona, Media, dan Kepanikan Publik). *METAMORFOSIS| Jurnal Bahasa, Sastra Indonesia Dan Pengajarannya*, 14(1), 28–36.
- Nadia Alfi Hidayah, Ciara Friska Sudrajat, Vina Salma, Sri Maulidiya Ardiyanti, Dyah Prabaningrum, Asep Purwo Yudi Utomo, & Rossi Galih Kesuma. (2024). Analisis Tindak Tutur Ekspresif dalam Novel Laut Bercerita Karya Leila S. Chudori. *Journal of Student Research*, 2(4), 208–226. <https://doi.org/10.55606/jsr.v2i4.3203>
- Nadzifah, Z. N., & Utomo, A. P. Y. (2023). Tindak tutur perlokusi pada dialog film Keluarga Cemara karya Yandy Laurens. *Jurnal Komposisi*, 5(2), 87–100.
- Nilam Aliya Putri, Sagita Tiara Dewi, Fiky Nafian, Izmi Ayyita Rahmawati, Syavrina Fatwa Aulia, Asep Purwo Yudi Utomo, Ahmad Ripai, & Rosita Rahma. (2025). Analisis Tindak Tutur Asertif dalam Film “Sweet 20” Karya Ody C. Harap. *Sintaksis : Publikasi Para Ahli Bahasa Dan Sastra Inggris*, 3(5), 204–232. <https://doi.org/10.61132/sintaksis.v3i5.2283>
- Nursita, S., Amala, R. N., Purwo, A., & Utomo, Y. (2022). *ANALISIS PRINSIP KESANTUNAN DALAM DIALOG NARASI MATA NAJWA EPISODE COBA-COBA TATAP MUKA*. 3(02), 111–120.
- Purwo Yudi Utomo, A., Akhmad Mafaza, A., Ika Puspita, N., Ramadhani, F., Bagus Firmansyah, D., Widhiyanto, R., Galih Kesuma, R., Bahasa dan Sastra Indonesia, P., & Negeri Semarang, U. (2024). TINDAK TUTUR EKSPRESIF VIDEO KULIAH NEGOSIASI PADA CHANNEL YOUTUBE KULIAH KEHIDUPAN. In *Jurnal Ilmiah Bahasa dan Sastra Indonesia* (Vol. 3, Number 1). Mei.
- Puspitasari, R., Dewi, E. M., Nina, A., Fahonah, N., Sari, V. W., Maharani, A., Purwo, A., Utomo, Y., & Galih, R. (2024). Analisis Tindak Tutur Lokusi dalam Daftar Putar Ruang BK pada Channel YouTube Cerdas Berkarakter Kemendikbud RI Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Semarang Program Studi Bimbingan dan Konseling, Universitas Negeri Semarang. 2(1), 24–44.
- Putri, D. A. W., & Utomo, A. P. Y. (2021). aksud Kata Makian pada Media Sosial Twitter (Kajian Pragmatik). 12(2), 162–176.
- Putri, V. A., Almajid, M. R., Parameswara, M. D., Saputra, M. A., Purwo, A., Utomo, Y., & Kesuma, R. G. (2025). Analisis Keefektifan Kalimat pada Teks Opini dalam Website Liputan6. com Edisi Februari 2025 sebagai Bahan Bacaan dan Sumber Informasi

bagi Mahasiswa Indonesia yang belum memahami standar bahasa Indonesia .
Sampai saat ini , orang-orang penyusunan yang j. 3(September).

- Rahmasari, L., & Utomo, A. P. Y. (2021). Analisis Tindak Tutur Ilokusi pada Vlog Jangan Lupa Senyum Part 1 di Kanal Youtube Fiersa Besari. *ESTETIK: Jurnal Bahasa Indonesia*, 4(1), 1–16.
- Rosyada, A., Fitroh, A., Hidayah, E., Kusumaningrum, N. L., Ramadhan, S. D., Utomo, A. P. Y., & Kesuma, R. G. (2024). Analisis Tindak Tutur Ilokusi Pada Video Pembelajaran Pidato Bahasa Indonesia Dalam Kanal Youtube “Literasi Untuk Indonesia.” *Morfologi: Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra Dan Budaya*, 2(2), 45–63.
- Sajida, Y. A., Tsaabita, Z., Damanik, Z. P. S., Qorizki, D., Fakhrani, A. F., Utomo, A. P. Y., & Prasandha, D. (2024). Analisis Tindak Tutur Ilokusi dalam Cuitan Akun X Calon Presiden 2024 Nomor 1 Anies Baswedan. *Jurnal Kajian Dan Penelitian Umum*, 2(4), 31–56.
- Sugiyono, D. (2010). *Memahami penelitian kualitatif*.
- Sugiyono, P. D. (2010). Metode Peneliian. *Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*.
- Sugiyono, P. D. (2019). metode penelitian pendidikan (kuantitatif, kualitatif, kombinasi, R&D dan penelitian pendidikan). *Metode Penelitian Pendidikan*, 67, 18.
- Suryani, I. P., Maftuchah, I., Ariyanto, P., Iqbal, M., Purwo, A., & Utomo, Y. (2022). *Analisis Jenis Kalimat dalam Cerpen “Arti Matahari untuk Bintang” Karya Aiyuu* (Vol. 1, Number 1). <http://jurnalilmiah.org/journal/index.php/majemuk>
- Syahrin Thohir Fatkhun Ni’am, A. P. Y. U. (2020). *ANALISIS PEMATUHAN DAN PELANGGARAN PRINSIP KESANTUNAN BERBAHASA PADA KEGIATAN PRAKTIK DEBAT SISWA KELAS X SMA NEGERI 1 PECANGAAN*. 9(2).
- Utomo, A. P. Y., Fahmy, H. Z., & Indramayu, A. (2019). Kesalahan Bahasa pada Manuskrip Artikel Mahasiswa di Jurnal Sastra Indones. *Jurnal Sastra Indonesia*, 8(3), 234–241.
- Wijaya, Y. D. (2021). *WIDYA ACCARYA : Jurnal Kajian Pendidikan FKIP Universitas Dwijendra* Vol 12 No 2 , Oktober 2021 P ISSN : 2085-0018 E-ISSN : 2722-8339 Available Online at <http://ejournal.undwi.ac.id/index.php/widyaaccarya/index> Penggunaan Google Classroom dan Zoom Meeting. *Jurnal Kajian Pendidikan FKIP Universitas Dwijendra*, 12(2), 288–305.
- Wijayanti, W., & Saputra, A. W. (2021). Implementasi Kesantunan Berbahasa Mahasiswa dalam Pembelajaran Daring pada Masa Pandemi. *Jurnal Sastra Indonesia*, 10(3), 248–254. <https://doi.org/10.15294/jsi.v10i3.47207>
- Wulandari, E., & Utomo, A. P. Y. (2021). Analisis Tindak Tutur Representatif Dalam Video “Trik Cepet Jawab Soal Matematika Bahasa Inggris Versi Jerome!” Pada Saluran Youtube Jerome Polin. *Jurnal Sastra Indonesia*, 10(1), 65–70.
- Wulandari, T. H. (2020). *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. WFace Threatening Act of Different Ethnic Speakers in Communicative Events of School Context*, 9(2), 92–97.
- Yustiani, E., Alifa, N., Arti, W., Qolbi, F., Utomo, A. P. Y., Widhiyanto, R., & Abiprayu, K. B. (2024). Analisis Kesantunan Berbahasa Dalam Film Pendek Negosiasi Kelas X Pada Saluran Youtube Cinta Bahasa. *Pragmatik: Jurnal Rumpun Ilmu Bahasa Dan Pendidikan*, 2(2), 33–57.